

Kontrol Politik Kyai dan Blater dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik di Madura

Political Control of Kyai and Blater in The Election Implementation: The Study of The Weakness of Election Law Provisions Facing Regime of Political Twins in Madura

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum adalah perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dimaksudkan sebagai representasi dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Fenomena yang terjadi di Madura ialah kebalikan dari makna pasal tersebut karena kuatnya pengaruh figur kyai dan blater dalam percaturan Pemilu. Fakta yang terjadi bahwa selama beberapa periode terakhir empat kabupaten di Madura dipimpin oleh Kyai. Masyarakat Madura menganggap bahwa peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatologis terutama dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau derita di alam kehidupan akhirat.

Kata Kunci : Kyai, Blater, Politik, dan Pemilu.

Abstract

Elections are a manifestation of a democratic system embraced by most countries in the world. The execution of direct elections is intended as a representation of the provisions of article 1, paragraph 2 of the Constitution of 1945, which states that "sovereignty is in the hands of the people who are executed according to the constitution". The phenomenon that occurs in Madura is the opposite of the meaning of the article because of the strong influence of kyai and blater figures in the election arena. The fact is that four districts in Madura were led by Kyai in recent periods. Madurese society the

role and function of the teacher to be emphasized more in the context of morality that is connected with the eschatological life, especially in the aspect of peace and salvation of the burden or suffering in the realm of the afterlife.

Keywords: *Kyai, Blater, Politic, and Election.*

PENDAHULUAN

Sejak terbukanya *kran* reformasi yang mengusung tema pembebasan dan kesetaraan yang berdampak pada perubahan tatanan di berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia. Realitas ini dengan cepat merembet ke berbagai wilayah dan penjuru negeri. Terlebih ketika disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dilaksanakan di Indonesia mulai 1 Januari 2001. Kondisi ini menyebabkan besarnya peluang serta terbukanya kesempatan politik bagi aktor dan budaya politik lokal untuk tampil kembali ke Panggung Politik setelah dalam waktu yang cukup lama terbelenggu dalam kehidupan politik yang sentralistik.¹

Hampir di seluruh wilayah Indonesia, fenomena tampilnya aktor dan budaya politik lokal ini menjadi gejala umum yang sangat mudah ditemui. Beberapa temuan penelitian di daerah bahkan menunjukkan adanya peningkatan gejala etnosentrisme yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Indonesia.² Paling tidak, gejala ini tampak dalam beberapa

¹ Mutmainnah, *Kehidupan Politik di Madura Pasca Orde Baru*, Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura II dengan tema “*Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, dan Pertanian*”. Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Budaya dan Potensi Madura LPPM UTM, pada tanggal 12 November 2014, hlm 13.

² Djohermansyah Djohan, *Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Dalam Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Jakarta; LIPI Press, 2007), hlm. 224.

peristiwa penting seperti pemekaran daerah, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pengisian anggota DPRD, rekrutmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan.

Gejala seperti yang dipaparkan diatas ternyata juga terjadi di Madura, khususnya dalam ikhwal pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan kepala desa sekalipun terdapat 2 (dua) kekuatan penentu dalam pemenangan salah satu calon atau pasangan calon. Kedua figur tersebut ialah kyai dan Blater.³ Tentu saja keberadaan dua figur tersebut dalam sisi tertentu dapat membawa dan menciptakan kemaslahatan bagi perkembangan tatanan kehidupan menuju peradaban umat manusia. Begitu juga sebaliknya, keberadaannya bisa juga semakin memperkeruh keadaan. Tergantung pada kepentingan dan moment yang ditekuninya.

Sejatinya, tujuan yang hendak dicapai atas dilaksanakannya pemilihan umum secara langsung ialah untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin ataupun saat penyaringan calon-calon pemimpin.⁴ Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dengan tampilnya lokalitas hukum dalam penyelenggaraan pemilu justru semakin memebrikan hasil yang maksimal dalam upaya penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karenanya dibutuhkan kajian mendalam tentang fenomena 2 figur tersebut dan bagaimana dampak positif dan negatifnya bagi pengembangan sistem demokrasi di Indonesia.

³ Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*. (Yogyakarta; Pustaka Marwah Publisher, 2004), hlm. 13.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 332.

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, pemilihan umum diselenggarakan tidak lain merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia. Pemilihan umum merupakan representasi prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi tonggak dari segala prinsip-prinsip demokrasi. Dengan artian bahwa demokrasi menghendaki seluruh keputusan mengenai penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan kehendak rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya untuk dan demi kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dimaksudkan sebagai representasi dari ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Pasal ini memberikan makna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan dasar yang mana Undang-Undang Dasar telah menetapkan bahwa kedaulatan rakyat yang dimaksud ialah suatu pelaksanaan negara yang didasarkan oleh kehendak rakyat dimana salah-satu dari bentuk kedaulatan rakyat tersebut ialah dengan terlaksananya pemilihan umum secara langsung.

Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945⁵ mengamanahkan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip-prinsip seperti jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, atau akrab dengan

⁵ Lihat pula beberapa prinsip yang harus dipegang dalam penyelenggaraan pemilu di beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan Pemilukada.

sebutan “jurdil luber”. makna dari keseluruhan prinsip tersebut ialah wewenang memilih mutlak berada di tangan pemilih sesuai dengan pilihan nurani tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta suatu pemimpin publik yang ideal dan sesuai dengan visi dan misi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan diri, keluarga, atau golongannya.

Bertolak dari ketentuan diatas, fenomena yang terjadi di Madura ialah kuatnya pengaruh figur kyai dan blater,⁶ dalam percaturan pemilihan umum seolah telah menciptakan pola tersendiri bagi masyarakat Madura dalam menyikapi pemilihan umum. dan ini menjadi control sosial yang khas dalam masyarakat Madura. Dalam bukunya “ *The behavior of law*”, Donald Black menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mampu mempengaruhi keberlakuan hukum ialah terdiri atas; stratifikasi sosial, morfologi, organisasi, kontrol sosial dan kultur.⁷ Khusus mengenai control sosial, Black menyatakan bahwa bila disuatu wilayah terdapat control sosial yang begitu kuat, bisa dipastikan keberlakuan hukunya akan mengalami kelemahan. Bila temuan Black ini diterapkan pada fenomena dua figur diatas, maka kesimpulan yang didapat ialah kontrol sosial berupa kuatnya pengaruh kyai dan blater tersebut mampu mengalahkan ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Beberapa fakta menegaskan bahwa selama beberapa periode terakhir empat kabupaten di Madura dipimpin oleh Kyai. Dimulai dari

⁶ Blater adalah elite pedesaan yang memiliki *social origin* dan tradisi yang berbeda dengan kuitur kyai. Bila kyai dibesarkan di dalam kultur keagamaan, sedangkan blater dibesarkan dalam kultur jagoanisme, dekat dengan ritus kekerasan. Bila kyai dekat dengan tradisi tahlilan dan pengajian maka blater dengan dengan tradisi sandur, remoh dan kerapen sapi. (Lontar Madura, Edisi 5 Juni 2012).

⁷ Donald Black, *The Behavior Of Law*, (New York; Academic Press, 1976), hlm. 2.

Bangkalan, Di Bangkalan Makmun Ibnu Fuad, dia merupakan figur dari golongan kyai yang tampil sebagai sebagai calon Bupati. Ia merupakan cicit ulama' kenamaan Madura yaitu Mbah Kholil, dengan modal trah kyai tersebut Makmun Ibnu Fuad mampu mengungguli lawan-lawannya termasuk calon yang juga masih mempunyai hubungan keluarga dengannya. Selain bermodalkan trah kyai, Makmun Ibnu Fuad bergandenga dengan Mondir Rofii yang juga memiliki relasi yang cukup kuat dengan Blater di seluruh Bangkalan. Tidak mengherankan pada pemilihan Calon Bupati Bangkalan yang kedua kalinya tahun 2018 medatang ia tetap unggul telak dari lawan-lawannya.⁸

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang 2013 dimenangkan oleh Fannan Hasib yang berpasangan dengan Fadillah Budiono dengan perolehan suara pada saat itu 31,44%. Sebelumnya Fannan Hasib adalah Bupati Sampang periode 2008-2012. Fannan memiliki trah kyai karena ia merupakan keturunan dari Pondok Pesantren Prajjan Sampang, Pesantren pesantren tersebut merupakan pesantren tertua di Kabupaten Sampang. Selain dirinya seorang kyai, ia juga mendapat dukungan dari para kyai di Kabupaten Sampang, termasuk dari Kyai Sepuh Alawi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa posisi kyai masih mendominasi kekuatan politik di masyarakat Kabupaten Sampang.⁹

Di kabupaten Pamekasan, Kholilurrahman dan Wakilnya Dadang tampil sebagai pemenang dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2008. Kholilurrahman merupakan kerabat dari kyai di Pesantren Banyuanyar dan Bata-bata, Pesantren tertua di Pamekasan yang memiliki massa fanatic dan juga Pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda Desa

⁸ Mutmannah, *Loc. Cit*, hlm. 27.

⁹ *Ibid*, hlm 27.

Panemapan. Selain itu, ia juga memiliki dukungan dari para kyai sepuh di Pamekasan.¹⁰ Kholilurrahman kembali melanjutkan sebagai calon sebagai anggota DPR-RI juga tampil sebagai pemenang dan bahkan merupakan calon yang mendapatkan suara terbanyak di Madura. Disinyalir dukungan juga datang dari para blater di Pamekasan. Menyatunya dua kekuatan ini mampu mengendalikan masyarakat untuk memilih pilihan sesuai yang diinginkan oleh kedua figur tersebut.

Pilkada di Kabupaten Sumenep menjadikan ajang pembuktian bahwa dominasi kuat kyai sebagai penentu kemenangan dalam pemilihan umum di Madura masih mendapatkan tempat di hati masyarakat Madura. Ini bisa dibuktikan dengan terpilihnya Kyai Ramdhan Siradj pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2000, dan berlanjut pula pada pemilihan kepala daerah secara langsung di tahun 2005. Ia mendapatkan dukungan mayoritas kyai di Sumenep termasuk dukungan dari pesantren tertua di Sumenep yakni Annuqayah Guluk-Guluk. Faktor inilah yang mengantarkannya terpilih hingga dua periode. Pada Pilkada 2010 kemarin, figur kyai kembali merengkuh kekuasaan di kabupaten Sumenep dengan terpilihnya Abuya Busyro Karim dan Sungkono Siddik sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Busyro Karim adalah kyai pengasuh pondok pesantren Al-Karimiah di Sumenep. Berkat trah kyai itulah dapat memudahkannya dalam memperoleh dukungan masyarakat Sumenep, ini juga faktor yang mengantarkannya terpilih hingga dua periode.¹¹

Selain kyai yang sukses dalam pencalonannya sebagai pejabat publik, peranan kyai juga memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam hal dukungan terhadap salah satu calon atau pasangan calon yang dia pilih.

¹⁰ *Ibid*, hlm 28.

¹¹ *Ibid*, hlm 29.

Tidak jarang di Madura banyak para kyai yang keluar barak guna mengkampanyekan calon pilihannya. Seperti yang terjadi pada Pilkada kabupaten Pamekasan tahun 2012 silam dimana masing-masing calon saling mengklaim bahwa dialah yang mendapat restu dari mayoritas kyai di Pamekasan.

Terkait kuatnya figur kyai, fenomena ini disebabkan ke-khasan kultural yang nampak pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagamaan. Keempat figur itu adalah Buppa,' Babbu, Guru, dan Rato (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin pemerintahan).¹² Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya mereka. Khusus kepatuhan terhadap kyai, Penggunaan dan penyebutan istilah guru menunjuk dan menekankan pada pengertian Kiai-pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangnya Ustadz pada "sekolah-sekolah" keagamaan.

Masyarakat Madura menganggap bahwa peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatologis — terutama dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau derita di alam kehidupan akhirat (morality and sacred world). Oleh karena itu, ketaatan orang-orang Madura kepada figur guru menjadi penanda khas budaya mereka yang — mungkin — tidak perlu diragukan lagi keabsahannya. Guru berjasa dalam mencerahkan pola pikir dan perilaku komunal murid untuk memperoleh kesejahteraan hidup di

¹² Taufiqurrahman.. *Islam dan Budaya Madura*. Makalah dipresentasikan pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung. 2006, hlm. 7.

dunia dan keselamatan mendiami negeri akhirat kelak.¹³ Kontribusi mereka dipandang sangat bermakna dan berjasa besar karena telah memberi bekal untuk survivalitas hidup di alam dunia dan keselamatan akhirat pascakehidupan dunia. Ini menunjukkan bahwa tradisi keberislaman masyarakat Madura telah menyatu dengan budaya yang selama ini menjadi pedoman hidup.

Sedangkan kepatuhan pada sosok blater tidak lain disebabkan karena blater adalah orang kuat yang keberadaannya sebagai pengendali keamanan wilayah tertentu di Madura.¹⁴ Blater adalah sosok orang kuat di Madura, baik secara fisik maupun magis dan biasanya dikenal memiliki ilmu kebal, pencak silat atau ilmu bela diri. Seorang jago/blater dapat dengan mudah mengumpulkan pengikut, anak buah dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun besaran jumlah pengikutnya sangat tergantung atas kedigdayaan ilmu (kekerasan) yang dikuasainya. Sosok jago atau blater yang sudah malang melintang di dunia kekerasan, dan namanya sudah sangat tersohor karena ilmu kesaktianya akan menambah kharisma dan kekuatannya untuk mempengaruhi banyak orang. Kondisi ini mengantarkan sosok jagoan selalu memiliki peran signifikan di tengah masyarakat.¹⁵

Selain itu, Blater juga banyak menguasai wilayah-wilayah tertentu di Madura, bahkan banyak pula blater yang menjadi Kepala Desa, utamanya di daerah-daerah pedalaman yang belum tersentuh laju pembangunan. Keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat memiliki posisi yang

¹³ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁴ A. Latif Wiyata, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 67.

¹⁵ Abdur Rozaki, *Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura*, *Jurnal Kyoto Review of Southeast Asia* Issue Vol. 11, No. 2, Desember 2011. hlm. 3.

cukup signifikan. Ini dikarenakan menyangkut keselamatan diri dan harta benda. Bila keberadaan blater terusik atau ditentang oleh masyarakatnya, maka hal yang sangat mungkin terjadi ialah terciptanya kondisi keamanan wilayah yang tidak kondusif, maling berkeliaran, dan banyaknya masalah-masalah lain yang mengiringinya. Oleh karenanya, masyarakat Madura lebih mendahulukan kemaslahatan daripada memilih kebenaran sementara kondisi soasialnya berantakan.¹⁶ Faktor inilah yang menyebabkan blater mempunyai posisi dominan dalam kehidupan masyarakat Madura, dan tidak menutup kemungkinan keberadaannya mampu mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon yang didukungnya.

Menjadi kekuatan politik yang begitu besar manakala antara kyai dan blater terjalin hubungan kultural dalam upaya pemenangan calon atau pasangan calon tertentu. Penyatuan keduanya menjadikannya sebuah kekuatan maha besar yang sulit ditandingi oleh kekuatan yang lain. Sekaligus menandakan lemahnya keberlakuan amanat aturan perundang-undangan yang mengamanahkan dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih secara jujur, adil, rahasia, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun. Dalam kondisi ini, kontrol sosial yang dominan yang dibuktikan dengan kuatnya pengaruh kyai dan blater, telah secara nyata melemahkan posisi aturan hukum yang berlaku terkait persoalan pemilu.

¹⁶ Abdur Rozaki, *Op. Cit.*, hlm. 34.

KESIMPULAN

Keberadaan figur kyai dan blater telah menciptakan sistem politik kuasa yang mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan pemilihan umum (baik pemilihan umum kepada daerah, DPR, dan Presiden) di Madura. Keduanya mampu menentukan siapa calon atau pasangan calon yang akan menang dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Sekalipun beberapa peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu harus dilandasi dengan prinsip adil, jujur, umum dan rahasia, namun ketentuan ini menjadi tidak efektif (melemah) manakala ada pengaruh dominan yang menciptakan suatu kekuatan control sosial dari kyai dan blater sebagai penguasa kembar kekuasaan politik di Madura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Donald, *The Behavior Of Law*. New York: Academic Press, 1976.
- Djohan, Djohermansyah, *Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Dalam Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta; LIPI Press, 2007.
- Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kyai dan Blater Sebagai Rezim Kembar di Madura*. Yogyakarta: Pustaka Marwah Publisher, 2004.
- Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wiyata, A Latif, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yokyakarta; LKiS, 2006.

Jurnal dan Makalah

Mutmainnah, "Kehidupan Politik di Madura Pasca Orde Baru", Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura II dengan tema "*Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan, dan Pertanian*". Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Budaya dan Potensi Madura LPPM UTM, 2014.

Rozaki, Abdur, "Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura", Jurnal *Kyoto Review of Southeast Asia Issue* Vol. 11. No. 2, Desember 2011.

_____, "Pemimpin Informal di Madura", Lontar Madura Edisi 24 Juni 2012.

Taufiqurrahman, "Islam dan Budaya Madura". Makalah dipresentasikan pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah